RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2025-2029

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan indikator kinerja Bappeda selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk mendukung peran strategis Bappeda dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, berbasis data, responsif terhadap dinamika pembangunan, serta mendorong penguatan fungsi penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan regulasi sektoral lainnya. Di samping itu, proses penyusunan Renstra ini juga dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan keselarasan arah pembangunan lintas sektor.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, serta unsur masyarakat yang telah memberikan masukan konstruktif.

Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang efektif, akuntabel, dan adaptif, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pembangunan daerah yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 19 September 2025
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Aries Fhariandi, S.Sos., M.Si.
NIP 197904222003121009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.3.1 Maksud 6
1.3.2 Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda 9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 9
2.1.2 Sumberdaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 22
2.1.2.1 Sumberdaya Manusia 22
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana 27
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 31
2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Renstra Periode Sebelumnya 31
2.1.3.2 Realisasi Anggaran Renstra Periode Sebelumnya 43
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 44
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 44
2.2.1 Permasalahan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 44
2.2.2 Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 44
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 44
3.2 Strategi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 44

3.3 Arah Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 44
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....44
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 44
5.1 Kesimpulan 44
5.2 Kaidah Pelaksanaan 44
5.3 Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sumberdaya Manusia Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Berdasrkan Status Kepegawaian 22

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan 23

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan 23

Tabel 2.4 Jumlah Non ASN dan Outsourcing Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan 24

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kepangkatan dan Golongan/Ruang 24

Tabel 2.6 Jumlah Sumberdaya Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jabatan 26

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Kepulauan Riau ... 28

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 35

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 44

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perprogram Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 44

Tabel 2.11 Mitra Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 47

Tabel 2.12 Tugas Tambahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 49

Tabel 2.13 Pemetaan Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 55

Tabel 3.1 Pemetaan Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 61

Tabel 3.2 Target Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 63

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 65
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 66
Tabel 4.1 Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 69
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 73
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 100
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 128
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 129
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Penulisan Dokumen Renstra.....8
Gambar 2.1 Bagan Struktur Orgranisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepuluan Riau 21
Gambar 2.2 Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-202 39
Gambar 2.3 Capaian Indek Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 41
Gambar 3.1 Keterkaitan Antara RPJMD dan Renstra Dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Riau 60
Gambar 3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2026 64
Gambar 4.1 Mekanisme Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....68

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab strategis untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk merancang arah pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, sistematis, dan responsif terhadap tantangan zaman agar mampu menopang ketahanan daerah sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Dokumen Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk memastikan keselarasan kebijakan kelembagaan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional, seperti RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045, serta RPJMN Tahun 2025–2029. Penyusunan ini juga mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang teknokratis, partisipatif, politis, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Dalam konteks tersebut, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah melalui fungsi perencanaan, pengkajian, dan inovasi kebijakan berbasis data dan bukti. Sebagai institusi yang mengintegrasikan peran perencana, peneliti, dan pengembang, Bappeda dituntut mampu menjadi motor penggerak dalam mendorong sinkronisasi program pembangunan antar sektor, peningkatan kualitas perencanaan berbasis riset, serta penguatan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pembangunan Kepulauan Riau.

Letak geografis Kepulauan Riau yang strategis sebagai wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri dalam pembangunan. Dinamika ekonomi, sosial, lingkungan, serta arus globalisasi menuntut hadirnya perencanaan pembangunan yang adaptif, berbasis data, dan didukung oleh inovasi kebijakan yang kontekstual. Oleh karena itu, Bappeda dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor agar mampu merespons berbagai isu strategis pembangunan daerah secara cepat dan tepat.

Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen teknis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, serta indikator kinerja utama yang terukur. Dokumen ini menjadi rujukan kerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah secara terpadu. Penyusunan Renstra ini juga menerapkan pendekatan manajemen strategis dan kerangka logis (*logic model*) guna memastikan keterpaduan antara *input*, proses, *output*, *outcome*, dan dampak yang diharapkan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan peran strategisnya dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data dan inovasi, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta

menjadi institusi yang adaptif dan responsif dalam mengawal pencapaian visi pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta penguatan inovasi kebijakan. Landasan hukum ini menjadi referensi utama untuk memastikan bahwa arah strategis kelembagaan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045), arah kebijakan pembangunan lima tahunan (RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029), serta prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029.

Dengan memperhatikan berbagai regulasi tersebut, penyusunan Renstra Bappeda dilakukan secara sistematis guna menjamin keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, memperkuat dasar legalitas kelembagaan, serta memastikan konsistensi perencanaan pembangunan yang adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based planning*). Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pelaksanaan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan secara terpadu serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi I-5 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5887);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanakan Pengarusutamaan Gender Pada Pembangunan Nasional;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);

18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
21) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
22) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan kelembagaan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis dari visi, misi, dan agenda prioritas kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta menjadi landasan strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Selain berperan sebagai pedoman perencanaan, Renstra ini juga berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mengarahkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penguatan inovasi kebijakan secara terintegrasi. Melalui dokumen ini, Bappeda diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kelembagaan dalam mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi alat penting dalam memperkuat kapasitas perencanaan daerah serta mendorong tercapainya sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau secara menyeluruh.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini bertujuan untuk:

1) Memberikan arah strategis bagi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan, litbang, serta inovasi daerah selama periode 2025–2029;
2) Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, khususnya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045, serta dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2025–2029;
3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda, serta sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja kelembagaan secara sistematis, akurat, dan berbasis hasil;
4) Mendorong peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, penelitian, dan pengembangan melalui pendekatan berbasis data dan bukti (*evidence-based planning*), penguatan sistem informasi pembangunan

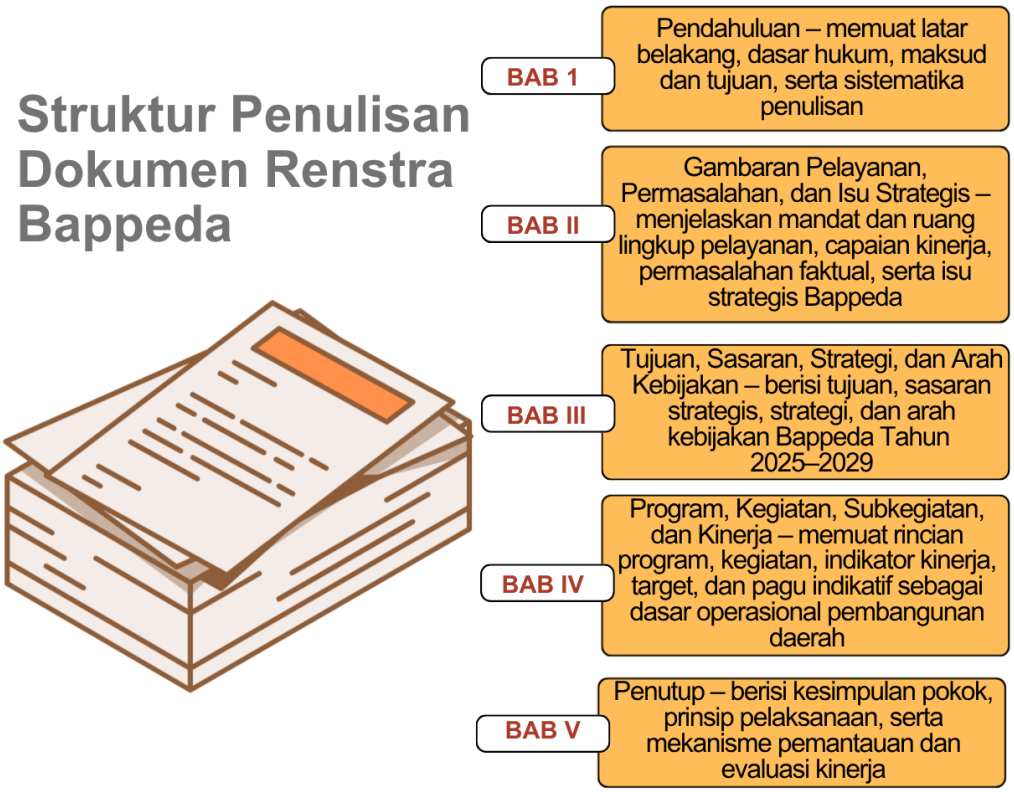
daerah, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung perumusan kebijakan yang inovatif dan adaptif;

5) Mewujudkan tata kelola organisasi Bappeda yang responsif terhadap dinamika pembangunan daerah dan nasional, akuntabel dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan litbang, serta berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat nyata bagi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan mengikuti sistematika yang merujuk pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Sistematika ini dirancang untuk memastikan bahwa perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan Bappeda tersusun secara runtut, logis, dan dapat diukur.

Gambar 1.1: Struktur penulisan dokumen Renstra



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda



Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut Bappeda yang dibentuk merupakan tipe A.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pergub tersebut, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang

Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
5) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari:

a) Sekretariat;

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2) Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi lingkup perangkat daerah;
3) Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang lingkup perangkat daerah;
4) Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran lingkup perangkat daerah;
5) Penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan lingkup perangkat daerah;
6) Penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
7) Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi lingkup perangkat daerah;
8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja lingkup perangkat daerah;
9) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
10) Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
11) Penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
12) Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
13) Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga, perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
2) Pelaksanaan dan menyiapkan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
3) Pelaksanaan dan menyiapkan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai;
4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
5) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
6) Penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
7) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
8) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
9) Penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2) Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3) Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4) Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6) Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
7) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
8) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
9) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

10) Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11) Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
12) Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
13) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d) Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2) Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3) Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

4) Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6) Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
7) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
8) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
9) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
10) Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
11) Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
12) Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
13) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan

Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
2) Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
3) Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
4) pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
6) Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
7) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
8) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

9) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
10) Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
11) Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
12) Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
13) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

f) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan Pembangunan;
2) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
4) Pelaksanaan koordinasi pagu indikatif perencanaan pembangunan daerah;
5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi muatan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan laporan capaian pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan, serta merekomendasikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangunan daerah Provinsi;
6) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, serta merekomendasikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
7) Pelaksanaan penyelarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
8) penyusunan dan pelaksanaan pelaporan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
9) Pelaksanaan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
10) Pelaksanaan koordinasi dan pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
11) Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

g) Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi serta melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

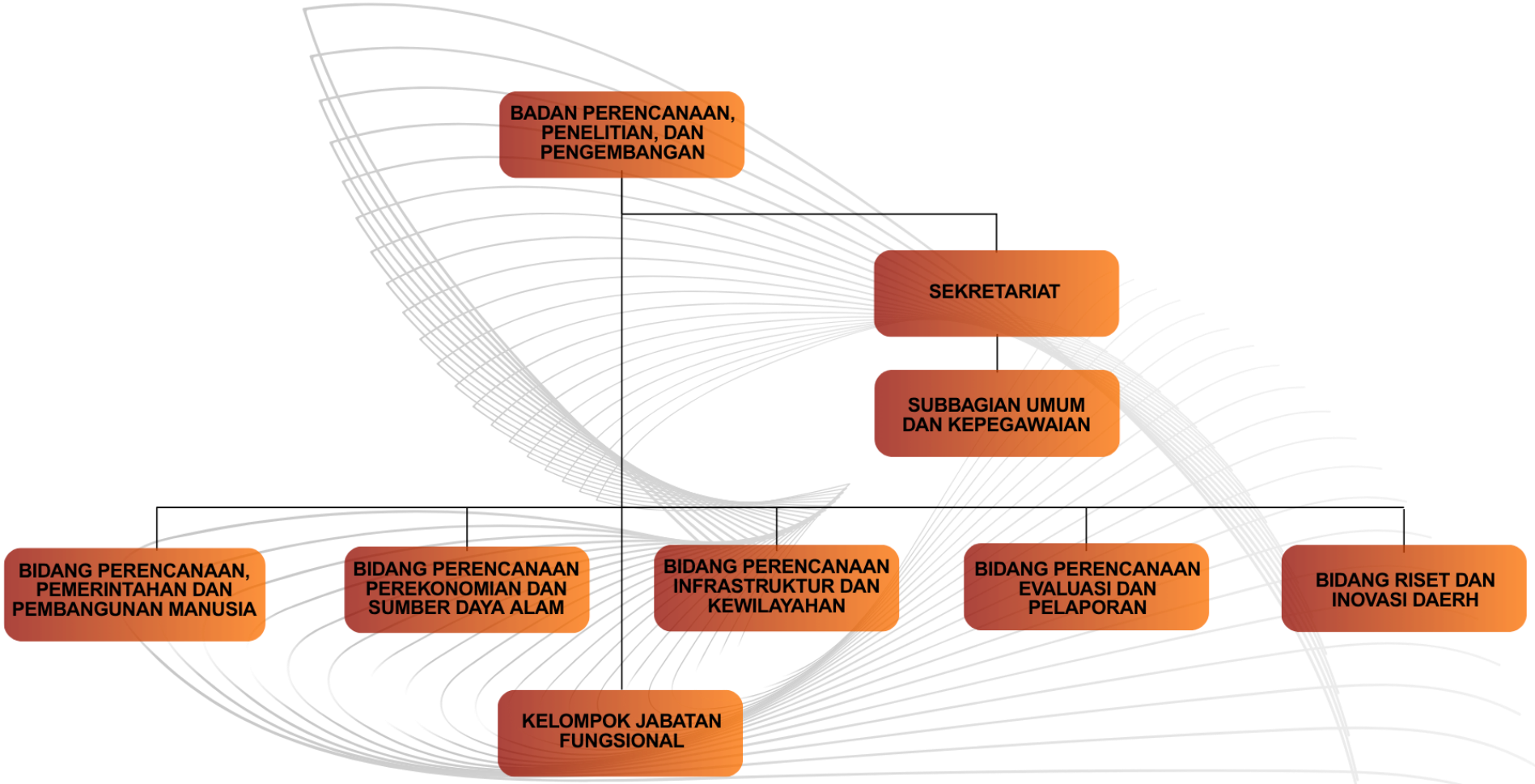
1) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
2) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
3) Pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan data pembangunan daerah di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
5) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait;

6) Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
7) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi Perangkat Daerah di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
8) Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
9) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta koordinasi sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
10) Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
11) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
12) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1: Bagan Struktur Orgranisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepuluan Riau



2.1.2 Sumberdaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan vital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat kecukupan dan kompetensi SDM yang dimiliki menjadi penentu utama efektivitas kinerja kelembagaan, terutama dalam menjalankan fungsi strategis perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan riset dan inovasi, serta perumusan kebijakan berbasis data dan analisis ilmiah. Oleh karena itu, penguatan manajemen SDM yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan berfokus pada kinerja menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang responsif dan akuntabel.

Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda selama periode 2025–2029 berjalan secara optimal, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi aktual SDM yang ada. Pemetaan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam menyusun arah kebijakan pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Selanjutnya, bagian ini menyajikan data dan informasi mengenai jumlah pegawai, tingkat pendidikan, sebaran usia, komposisi jenis kelamin, serta status kepegawaian, yang akan menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia Bappeda ke depan.

Tabel 2.1: Jumlah Sumberdaya Manusia Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Berdasrkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	LK	PR	JUMLAH	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	42	34	76	61,79
2	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	27	14	41	33,33
3	Non ASN dan *Outsourcing*	3	3	6	4,87
TOTAL		**72**	**51**	**123**	**100,00**

Tabel 2.2: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LK	PR	JUMLAH	%
1	Doktor (S3)	2	0	2	2,63
2	Magister (S2)	9	10	19	25
3	Sarjana (S1)	23	20	43	56,58
4	Diplomas 4 (D4)	2	2	4	5,26
5	Diplomas 3 (D3)	4	1	5	6,58
6	Diplomas 2 (D2)	0	0	0	0,00
7	Diplomas 1 (D1)	0	0	0	0,00
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	1	3	3,95
9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0	0	0,00
10	Sekolah Dasar (SD)	0	0	0	0,00
TOTAL		**42**	**34**	**76**	**100,00**

Tabel 2.3: Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LK	PR	JUMLAH	%
1	Doktor (S3)	0	0	0	0
2	Magister (S2)	0	0	0	0
3	Sarjana (S1)	15	10	25	60,98
4	Diplomas 4 (D4)	0	0	0	0
5	Diplomas 3 (D3)	0	1	1	2,44
6	Diplomas 2 (D2)	0	0	0	0
7	Diplomas 1 (D1)	0	0	0	0
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	12	2	14	34,15
9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0	0	0
10	Sekolah Dasar (SD)	1	0	1	2,44
TOTAL		**28**	**13**	**41**	**100,00**

Tabel 2.4: Jumlah Non ASN dan *Outsourcing* Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LK	PR	JUMLAH	%
1	Doktor (S3)	0	0	0	0
2	Magister (S2)	0	0	0	0
3	Sarjana (S1)	0	1	1	16,67
4	Diplomas 4 (D4)	0	0	0	0
5	Diplomas 3 (D3)	0	0	0	0
6	Diplomas 2 (D2)	0	0	0	0
7	Diplomas 1 (D1)	0	0	0	0
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	1	3	50,00
9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0	0	0
10	Sekolah Dasar (SD)	1	0	1	16,67
11	Tidak ada ijazah	0	1	1	16,67
TOTAL		**3**	**3**	**6**	**100,00**

Tabel 2.5: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kepangkatan dan Golongan/Ruang

NO	KEPANGKATAN	GOL/RUANG	LK	PR	JUMLAH	%
1	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	0,00
2	Pembina Madya	IV/d	2	1	3	2,56
3	Pembina Tingkat I	IV/c	2	0	2	1,71
4	Juru Tingkat I	IV/b	4	0	4	3,42
5	Pembina	IV/a	2	1	3	2,56
6	Penata Tingkat I	III/d	11	11	22	18,80
7	Penata	III/c	8	10	18	15,38
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	7	5	12	10,26
9	Penata Muda	III/a	6	5	11	9,40
10	Pengatur Tingkat I	II/d	0	0	0	0,00
11	Pengatur	II/c	0	1	1	0,85

NO	KEPANGKATAN	GOL/RUANG	LK	PR	JUMLAH	%
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	0	0	0,00
13	Pengatur Muda	II/a	0	0	0	0,00
14	Juru Tingkat I	I/d	0	0	0	0,00
15	Juru	I/c	0	0	0	0,00
16	Juru Muda Tingkat I	I/b	0	0	0	0,00
17	Juru Muda	I/a	0	0	0	0,00
18	Diploma IV/Sarjana	IX	14	11	25	21,37
19	Diploma III	VII	0	1	1	0,85
20	SMA/SMK/Diploma I	V	12	2	14	11,97
21	SD/Sederajat	I	1	0	1	0,85
TOTAL			**69**	**48**	**117**	**100,00**

Berdasarkan distribusi kepangkatan, sebagian besar ASN berada pada kelompok golongan III, khususnya golongan III/c hingga III/d, yang secara administratif termasuk dalam jenjang kepangkatan penata hingga penata tingkat I. Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai jenjang karier menengah, yang umumnya dihuni oleh pegawai dengan pengalaman kerja yang cukup dan berada pada tahap produktif dalam siklus karier birokrasi. Ketersediaan SDM pada jenjang ini memberikan kekuatan operasional sekaligus fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dan perencanaan strategis.

Namun demikian, proporsi pegawai pada golongan IV, yang mencerminkan jenjang kepemimpinan teknis atau manajerial yang lebih tinggi, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan pengembangan karier yang lebih terstruktur untuk mendorong akselerasi promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya beban dan kompleksitas tugas kelembagaan dalam bidang perencanaan, riset, dan inovasi, maka keberadaan ASN pada tingkat golongan atas menjadi penting sebagai penanggung jawab teknis dan pengambil kebijakan internal yang memiliki otoritas dan kompetensi memadai.

Tabel 2.6: Jumlah Sumberdaya Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jabatan

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1	0	1
2	Kepala Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5	1	6
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	0	1	1
	Jabatan Fungsional			
4	Analis Kebijakan Ahli Utama (IV/d)	1	1	2
5	Analis Kebijakan Ahli Muda (III/d)	4	0	4
6	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (III/d)	1	1	2
7	Perencana Keahlian Ahli Madya (IV/b)	1	0	1
8	Perencana Keahlian Ahli Muda (III/d)	2	6	8
9	Perencana Keahlian Ahli Muda (III/c)	4	5	9
10	Perencana Keahlian Ahli Pertama (III/b)	5	6	11
11	Perencana Keahlian Ahli Pertama (III/a)	2	0	2
12	Peneliti Keahlian Ahli Muda (III/d)	0	1	1
13	Peneliti Keahlian Ahli Pertama (III/a)	0	1	1
14	Pranata Komputer Keterampilan Penyelia (III/c)	1	0	1
15	Pranata Komputer Keterampilan Mahir (III/a)	1	0	1

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
16	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (III/b)	0	1	1
	Jabatan Pelaksana			
17	Bendahara	1	0	1
18	Penelaah Teknis Kebijakan	8	7	15
19	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	4
20	Pengolah Data dan Informasi	2	1	3
21	Fasilitator Pemerintahan	1	0	1
TOTAL		**42**	**34**	**76**

Dari aspek jabatan, proporsi jabatan fungsional cukup signifikan, terutama pada kelompok perencana, peneliti, dan analis kebijakan. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan Bappeda sebagai institusi teknis yang bertumpu pada penguasaan substansi dan kemampuan analisis kebijakan berbasis data. Sementara jabatan struktural yang tersedia terbatas pada posisi pimpinan dan kepala bidang, menunjukkan bahwa struktur organisasi Bappeda lebih banyak menekankan pada fungsi keahlian ketimbang struktur hirarkis.

Secara keseluruhan, sumber daya manusia Bappeda Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan kapasitas dasar yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan. Kendati demikian, tantangan ke depan menuntut adanya penguatan pada aspek kualitas SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan, pengembangan kompetensi fungsional, serta tata kelola manajemen kepegawaian yang lebih adaptif terhadap perubahan dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dari sumber daya pendukung yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang penyelenggaraan fungsi perencanaan dan penelitian secara optimal. Sebagai bagian dari infrastruktur non-SDM, keberadaan fasilitas fisik dan teknologi informasi memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem kerja yang mendukung efisiensi, efektivitas, serta produktivitas pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, kajian kebijakan, dan inovasi daerah.

Ketersediaan gedung kantor yang memadai, ruang kerja yang tertata dengan baik, kendaraan operasional, perangkat penunjang teknis, serta sistem informasi perencanaan yang andal menjadi prasyarat penting dalam menjamin kelancaran tugas dan fungsi kelembagaan. Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025–2029, sarana dan prasarana tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu operasional, tetapi juga menjadi bagian yang esensial dalam mendorong pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana perlu dilakukan secara terencana dan selaras dengan kebijakan kegiatan dan penganggaran, serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dinamis, perkembangan teknologi, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Bagian ini menyajikan gambaran kondisi aktual sarana dan prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar dalam merumuskan strategi penguatan infrastruktur kelembagaan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang periode perencanaan 2025–2029.

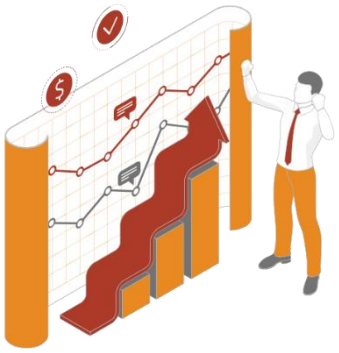
Tabel 2.7: Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA / JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	TOTAL NILAI PEROLEHAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1.	Mini Komputer	0	0	1	1	14.500.000,00
2.	P.C Unit	52	0	0	52	624.649.076,00
3.	Lap Top	114	0	0	114	1.817.296.782,50

NO	NAMA / JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	TOTAL NILAI PEROLEHAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
4.	Note Book	23	0	0	23	347.085.639,00
5.	Tablet PC	24	0	0	24	352.171.000,00
6.	Hard Disk	17	0	0	17	25.307.950,00
7.	CPU (Peralatan Mini Komputer)	0	0	1	1	13.250.000,00
8.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	102	0	0	102	326.248.550,00
9.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	0	2	4	22.563.300,00
10.	Peralatan Personal Komputer lainnya(loudspeker)	0	1	0	1	1.290.000,00
11.	Alat Tenis Meja	0	0	2	2	12.000.000,00
12.	Jeep	0	0	1	1	563.000.000,00
13.	Station Wagon	18	0	0	18	4.429.530.670,00
14.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	0	0	1	225.900.000,00
15.	Pick Up	1	0	0	1	159.830.000,00
16.	Sepeda Motor	17	0	0	17	315.428.000,00
17.	Mesin Ketik Listrik	2	0	0	2	14.927.500,00
18.	Mesin Absen (Time Recorder)	2	0	0	2	9.300.000,00
19.	Mesin Penghitung Uang	3	0	0	3	17.980.000,00
20.	Lemari Besi/Metal	1	0	0	1	88.700.000,00
21.	Lemari Kayu	30	0	0	30	575.597.987,00
22.	Filing Cabinet Besi	23	0	0	23	76.000.000,00
23.	Brandkas	2	0	0	2	16.950.000,00
24.	Lemari Kaca	2	0	0	2	8.500.000,00
25.	CCTV - Camera Control Television System	5	0	0	5	19.190.000,00
26.	White Board	0	0	1	1	27.700.000,00
27.	Alat Penghancur Kertas	20	0	0	20	96.173.200,00
28.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	12	0	0	12	73.115.000,00
29.	Alat Kantor Lainnya	0	0	5	5	104.900.000,00
30.	Meja Kerja Kayu	119	0	0	119	677.401.320,00
31.	Meja Rapat	12	0	0	12	84.200.000,00
32.	Meja 1/2 Biro	6	0	0	6	14.460.000,00

NO	NAMA / JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	TOTAL NILAI PEROLEHAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
33.	Kursi Rapat	81	0	0	81	194.729.000,00
34.	Kursi Putar	123	0	0	123	216.336.100,00
35.	Partisi	10	0	0	10	1.034.478.200,00
36.	Sofa	9	0	0	9	77.900.000,00
37.	Lemari Es	11	0	0	11	25.520.000,00
38.	A.C. Split	38	0	0	38	299.654.028,00
39.	Alat Pendingin lainnya	3	0	0	3	14.994.000,00
40.	Treng Air/Tandon Air	3	0	0	3	14.465.000,00
41.	Televisi	26	0	0	26	447.685.100,00
42.	Mic Conference	29	0	0	29	233.430.000,00
43.	Unit Power Supply	14	0	0	14	45.831.000,00
44.	Camera Video	6	0	0	6	108.400.000,00
45.	Tustel	14	0	0	14	155.064.300,00
46.	Tangga Aluminium	1	0	0	1	6.099.500,00
47.	Dispenser	5	0	0	5	12.945.000,00
48.	Coffee Maker	1	0	0	1	3.500.000,00
49.	Handy Cam	1	1	1	3	30.910.000,00
50.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0	0	42	42	187.600.250,00
51.	Alat Pemadam/Portable	17	0	0	17	22.610.000,00
52.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	0	0	6	10.980.000,00
53.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	0	0	2	14.251.000,00
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	0	0	5	12.480.000,00
55.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	0	0	15	35.696.300,00
56.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	0	0	6	11.814.000,00
57.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	6	0	2	8	17.672.000,00
58.	Microphone/Wireless MIC	1	0	0	1	7.000.000,00
59.	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	0	0	1	1	1.318.000,00
60.	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	0	1	3	63.639.000,00
61.	Camera Electronic	1	0	0	1	25.712.000,00
62.	Teleprompter	1	0	0	1	2.200.000,00

NO	NAMA / JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	TOTAL NILAI PEROLEHAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
63.	Tripod Camera	1	0	0	1	1.600.000,00
64.	Lensa Kamera	3	0	0	3	45.570.000,00
65.	Layar Film/Projector	0	0	1	1	19.700.000,00
66.	peralatan pemancar shf lainnya (dst)	2	0	0	2	9.880.000,00
67.	Alat Kedokteran umum lainnya	2	0	0	2	3.600.000,00
68.	Tripod	2	0	0	2	6.990.000,00
69.	Thermometer Digital Portable	3	0	0	3	3.600.000,00
Grand Total		**796**	**89**	**330**	**1.215**	**14.310.422.804,50**



2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Renstra Periode Sebelumnya

Capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya merupakan parameter utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan perencanaan dan penelitian pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau. Evaluasi terhadap capaian tersebut sangat krusial sebagai dasar dalam melakukan penilaian objektif serta perumusan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pembangunan pada periode selanjutnya secara berkelanjutan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan nasional serta berpedoman

pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja pelayanan yang telah diraih oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Berbagai indikator strategis yang menjadi tolok ukur kinerja, seperti integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini mencerminkan komitmen dan efektivitas pelaksanaan tugas Badan dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan terukur.

Tabel 2.8: Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE-			PERSENTASE CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
I	**Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025**											
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	92.33	93		98.28	100		106.44	107.53	
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	%	75	80		85.71	100		114.28	125.00	

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE-			PERSENTASE CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Daerah	%	35	40		48.78	72.72		139.37	181.80	
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	82		84.81	84.81		104.70	103.43	
II	**Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025**											
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks			Baik			Baik			100.00
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	%			100			100			100.00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE-			PERSENTASE CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks			Inovatif			Inovatif			100.00
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai			BB			BB			100.00
		IKM Bappeda	Skor			90			90			100.00

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Adapun penjelasan lebih rinci dari keempat indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

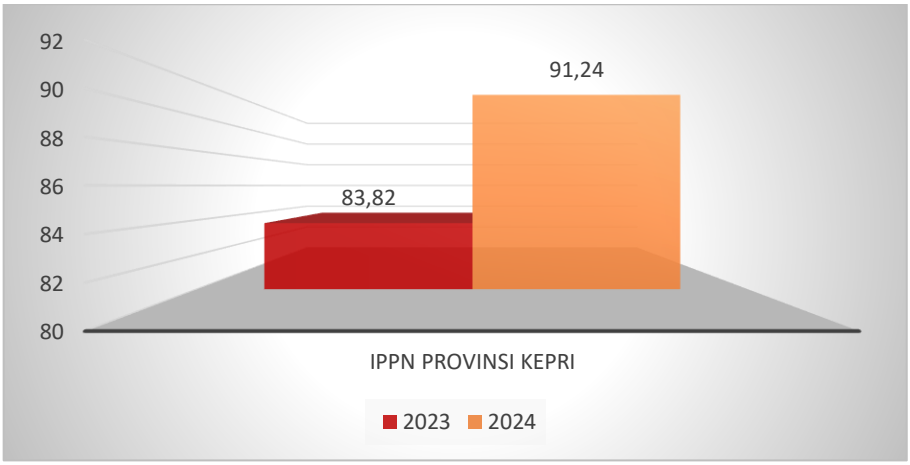
1. Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks Perencanaan dan Indeks Perencanaan Pembangunan merupakan dua ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan daerah, meskipun keduanya memiliki pendekatan penilaian yang berbeda. Indeks Perencanaan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, target indeks ditetapkan sebesar 92,33 dan realisasi mencapai 98,28, atau sebesar 106,44% dari target. Capaian ini terus meningkat pada tahun 2023 dengan target 93 dan realisasi 100, atau sebesar 107,53% dari target. Nilai ini dihitung berdasarkan rata-rata dari tiga komponen penting, yaitu persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, dan persentase keselarasan RKA Perangkat Daerah dengan RKPD. Hasil yang melebihi target mengindikasikan bahwa proses perencanaan di tingkat daerah telah berlangsung secara sinergis, terintegrasi, dan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sementara itu, Indeks Perencanaan Pembangunan juga menunjukkan hasil yang konsisten baik, sebagaimana ditunjukkan dengan nilai kualitatif “Baik” yang tercapai selama periode pengukuran. Penilaian ini didasarkan pada evaluasi dari Bappenas yang merupakan lembaga nasional yang berwenang dalam memantau kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Meskipun tidak disajikan dalam bentuk angka seperti Indeks Perencanaan, capaian ini tetap menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinilai memenuhi standar nasional dan telah mencerminkan tata kelola yang baik

dalam menyusun arah pembangunan. Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional hasil evaluasi oleh Bappenas dimulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

Gambar 2.2: Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024



Secara keseluruhan, capaian kinerja terhadap kedua indikator ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah telah terlaksana secara baik, baik dari sisi teknis keselarasan dokumen internal maupun dari segi penilaian eksternal oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi cerminan keberhasilan Bappeda dalam mengoordinasikan proses perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam satu arah pembangunan yang selaras.

2. Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan

Indikator "Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan" dan "Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan" merupakan dua indikator yang pada dasarnya mengukur efektivitas pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah. Keduanya saling melengkapi sebagai cerminan sejauh mana hasil riset yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tahap

akademik atau dokumen, tetapi benar-benar digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh perangkat daerah.

Pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan mencapai 85,71% dan 100%, yang dihitung menggunakan rumusan: jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah dikali 100. Rumusan ini menekankan keterkaitan langsung antara hasil litbang dan aksi nyata di perangkat daerah. Artinya, dari seluruh kegiatan litbang yang direncanakan, sebagian besar telah ditindaklanjuti menjadi program, kebijakan, atau bentuk pelaksanaan lainnya di lapangan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil kelitbangan telah dimanfaatkan secara nyata dan tidak hanya berhenti pada tahap konseptual.

Sementara itu, indikator Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan, pada tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 100%, Capaian ini menggambarkan bahwa seluruh hasil riset yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau pada tahun tersebut telah berhasil dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan. Penilaian ini lebih menitikberatkan pada aspek output riset, yaitu sejauh mana hasil kajian dikemas dan diformulasikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, capaian yang tinggi pada kedua indikator tersebut mencerminkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Bappeda, dalam mendorong penguatan peran kelitbangan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

3. Indeks Inovasi Daerah

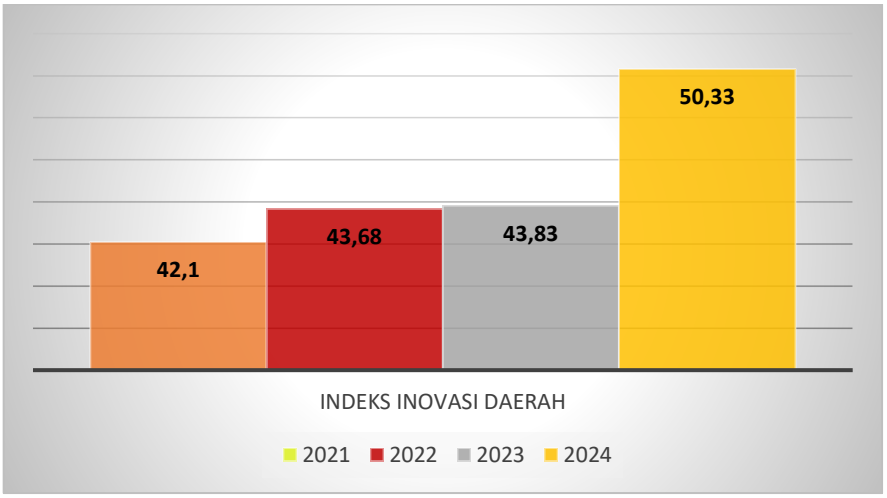
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah dan Indeks Inovasi Daerah pada dasarnya merupakan dua indikator yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola, mengimplementasikan, dan mengembangkan inovasi sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan

publik. Meskipun memiliki rumusan penghitungan yang berbeda, keduanya menggambarkan satu kesatuan proses inovasi daerah mulai dari perencanaan, usulan, hingga pelaksanaan.

Pada tahun 2022 dan 2023, capaian Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah mencapai angka 48.78% dan 72,72%, yang dihitung berdasarkan rumusan: jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan, dikalikan 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar inovasi yang dirancang oleh perangkat daerah berhasil diimplementasikan dalam bentuk kebijakan nyata, menandakan adanya komitmen dan kesiapan birokrasi daerah dalam mengadopsi perubahan berbasis inovasi.

Sejalan dengan itu, capaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah memperoleh skor 50,33, yang termasuk dalam kategori "Inovatif". Dapat dibandingkan dengan capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Gambar 2.3: Capaian Indek Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024



Penilaian ini mempertimbangkan sejumlah indikator seperti kebaruan (*novelty*), kebermanfaatan, kepentingan publik, kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah, serta aspek replikasi. Indeks ini diperoleh dari hasil evaluasi inovasi yang dilaporkan dan terverifikasi melalui sistem

penilaian nasional yang mengacu pada data konkret dari pemerintah daerah.

4. Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah mampu mengelola kinerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional yang bertujuan mendorong instansi pemerintah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta anggaran berdasarkan hasil (*outcome*), bukan hanya keluaran (*output*). Penilaian SAKIP dilakukan dengan mempertimbangkan lima komponen utama: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Capaian Nilai SAKIP Bappeda Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan, yaitu memperoleh predikat “BB” (Sangat Baik) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Predikat ini mencerminkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan telah menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang tinggi, dengan manajemen kinerja yang terarah, sistematis, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), bukan hanya pada pelaksanaan kegiatan (*output*).

5. Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. IKM menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kinerja pelayanan instansi

pemerintah, khususnya dalam hal responsivitas, keandalan, dan profesionalisme layanan.

Perhitungan IKM dilakukan berdasarkan hasil survei kepada pengguna layanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang mencakup sembilan unsur pelayanan, antara lain: persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Masing-masing unsur dinilai dalam skala tertentu, kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan, lalu dikonversi ke dalam skala 25–100 untuk mendapatkan nilai IKM akhir. Hasil tersebut selanjutnya dikategorikan ke dalam klasifikasi mutu pelayanan, seperti: sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Pada tahun 2024, IKM Bappeda Provinsi Kepulauan Riau mencapai nilai 90,093, yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

2.1.3.2 Realisasi Anggaran Renstra Periode Sebelumnya

Realisasi anggaran program menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kinerja anggaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016-2021, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Bappeda secara konsisten memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.

Tabel 2.7: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Belanja Barang, Jasa, Modal dan Pegawai	35.332.947.886	35.342.406.350	33.576.963.459	33.065.626.944	34.740.743.949	33.330.453.821	93,58	98,30	99,27

Tabel 2.10: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perprogram Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.554.132.030	5.939.832.462	3.741.181.127	2.398.046.160	5.723.996.143	3.721.941.666	93,89	96,37	99,49
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	4.965.759.020	2.372.851.990	1.851.430.388	3.859.584.373	2.288.816.888	1.836.513.295	77,72	96,46	99,19

NO	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-(%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Perencanaan Pembangunan Daerah									
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.718.898.693	807.248.000	743.490.996	1.403.397.562	789.676.114	742.584.939	81,65	97,82	99,88
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.654.903.048	26.222.473.898	27.240.860.946	22.834.479.268	25.938.254.804	27.029.413.921	97,36	98,92	99,22

Capaian realisasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Seluruh program berhasil merealisasikan anggarannya di atas 95% pada tahun 2024, dengan sebagian besar mendekati atau mencapai 99%. Hal ini menjadi indikator positif terhadap kinerja organisasi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi anggaran yang semakin matang dan akuntabel. Kinerja yang optimal ini diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan daerah secara berkelanjutan.



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Guna memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, serta evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Maka ditetapkan lah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 286/KPTS-26/I/2025 tentang Mitra Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Sasaran layanan Bappeda Provinsi mencakup pihak-pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kebijakan, termasuk Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai mitra strategis dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun rincian pembagian perangkat daerah dan Bidang yang mengampu pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 2.11: Mitra Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

NO	BIDANG PADA BAPPEDA	PERANGKAT DAERAH
1.	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat Daerah 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Kesehatan + Rumah Sakit (RSUDAT, RSJKOEHD) 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12. Dinas Kebudayaan 13. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan 14. Badan Kepegawaian Daerah Dan KORPRI 15. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 17. Badan Penghubung Daerah
2.	Koordinator Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	BIDANG PADA BAPPEDA	PERANGKAT DAERAH
		3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Kelautan dan Perikanan 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan 9. Badan Keuangan Dan Aset Daerah 10. Badan Pendapatan Daerah
3.	Koordinator Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, telah diberikan sejumlah tugas tambahan yang bersifat strategis dan berskala lintas sektor. Tugas-tugas tambahan ini tidak hanya memperluas cakupan kerja, tetapi juga mencerminkan peran aktif dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi berbagai agenda pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas tambahan tersebut telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan gubernur yang menjadi dasar hukum pelimpahan dan penugasan fungsi tertentu kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan. Adapun Rincian tugas tambahan yang diemban oleh Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12: Tugas Tambahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

NO	JABATAN	DASAR HUKUM
	Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	
1.	Wakil Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2.	Koordinator merangkap Anggota Komite Pengelolaan Risiko Provinsi	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
	Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
3.	Ketua Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau Sustainnable Development Goals (TBP/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 744 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau Sustainnable Development Goals (TBP/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026
4.	Kepala Divisi Administrasi Umum dan Kepala Divisi Penyusunan Program Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Selaku Ketua Dewan Kawasan Khusus Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03/DK/KEK Tahun 2018 tentang Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau
	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
5.	Pembina Tim Kerja Pembangunan dan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 443/KPTS-26/1/2025 tentang Tim Kerja Pembangunan dan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

NO	JABATAN	DASAR HUKUM
	di Badan Perencanaan Pengembangan Penelitian Provinsi Kepulauan Riau	Pemerintah di Badan Perencanaan Pengembangan Penelitian Provinsi Kepulauan Riau
6.	Ketua Tim Panelis Percepatan Penanggulangan Stunting Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 155 Tahun 2023 Tentang Tim Panelis Percepatan Penanggulangan Stunting Provinsi Kepulauan Riau
7.	Ketua Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 838 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Provinsi Kepulauan Riau
8.	Ketua Tim Pembina dan Sekretariat Pelaksana Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tim Pembina dan Sekretariat Pelaksana Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Kepulauan Riau
9.	Ketua Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 223 Tahun 2020 tentang Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi Kepulauan Riau
10.	Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 803 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	
11.	Anggota Forum Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 352 Tahun 2023 tentang Forum Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau
12.	Ketua Merangkap Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1082/KPTS/M/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Kepulauan Riau

NO	JABATAN	DASAR HUKUM
13.	Penanggung Jawab Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 738 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
14.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 374 Tahun 2023 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
15.	Penanggung Jawab Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
16.	Ketua Sekretariat Satu Data Tingkat Provinsi	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2029 tentang Satu Data Indonesia

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau



2.2.1 Permasalahan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan terintegrasi, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dihadapkan pada sejumlah permasalahan strategis yang perlu direspon secara terarah dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan kondisi obyektif yang menjadi dasar penyusunan isu strategis, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dinamika kebijakan pembangunan

daerah dan nasional, serta kebutuhan penguatan peran Bappeda dalam siklus perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang akan menjadi landasan dalam perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, serta program rencana strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau:

1) Belum Optimalnya integrasi dan keselarasan perencanaan lintas level pemerintahan

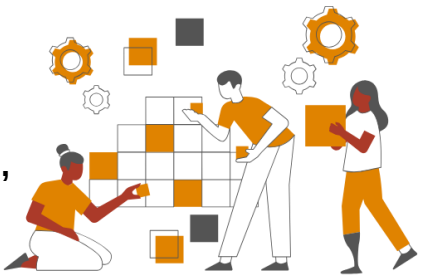
Proses perencanaan pembangunan daerah memerlukan penyelarasan yang lebih optimal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam hal penjabaran prioritas pembangunan, konsistensi program strategis, serta harmonisasi penganggaran. Hal ini penting untuk meningkatkan konsistensi pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

2) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah

Penerapan prinsip perencanaan berbasis kinerja dan sistem pengukuran yang objektif memerlukan penguatan lebih lanjut. Pencapaian kinerja yang tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada komponen perencanaan dan pengukuran, menunjukkan masih adanya ruang perbaikan yang harus direspons secara sistematis. Selain itu, integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan resiliensi rencana pembangunan.

3) Masih Terbatasnya pelaksanaan dan pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan dan peningkatan daya saing

Peran hasil penelitian dan pengembangan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan perlu diperkuat. Keterkaitan antara litbang, inovasi, dan perencanaan masih berkembang dan memerlukan penguatan ekosistem kolaboratif antar pihak terkait.



2.2.2 Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Penentuan isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi kelembagaan, permasalahan aktual, serta keterkaitannya dengan isu lingkungan strategis baik pada level global, nasional, maupun regional. Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah kekuatan, seperti tersedianya dokumen perencanaan lintas *level*, sistem e-SAKIP dan e-*Planning* yang telah berjalan, serta dukungan awal pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Namun, tantangan utama yang dihadapi mencakup belum optimalnya keselarasan perencanaan lintas sektor dan antar level pemerintahan, kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja yang belum merata, serta terbatasnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.

Dalam konteks dinamika global, terdapat tekanan yang semakin kuat terhadap tata kelola pembangunan yang inklusif, akuntabel, dan berbasis hasil, dengan pendekatan yang terintegrasi secara lintas sektor dan lintas level. Agenda internasional seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta tren menuju *knowledge-based economy* dan *agile government* menuntut kapasitas kelembagaan daerah yang adaptif dan berbasis bukti. Di tingkat nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi dan integrasi perencanaan pusat-daerah juga menjadi kerangka acuan utama, sementara pada tingkat regional, ketimpangan arah pembangunan dan disharmonisasi kebijakan sektoral masih menjadi persoalan yang harus diatasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan tiga isu strategis utama yang menjadi pijakan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda, yaitu:

1. **Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah secara konsisten, kolaboratif, dan berbasis bukti dalam rangka mendukung penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah melalui penerapan manajemen risiko.**
2. **Penguatan Kapasitas riset dan inovasi daerah untuk mendukung perencanaan dan pembangunan yang responsive dan berdaya saing.**

Kedua isu strategis ini akan menjadi fondasi dalam penetapan tujuan dan sasaran Renstra, serta akan dioperasionalisasikan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, dan indikator kinerja yang selaras dengan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.13: Pemetaan Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tersedianya dokumen perencanaan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dapat disinergikan Telah dikembangkan kerangka SAKIP dan sistem kinerja berbasis RPJMD di tingkat provinsi	Belum Optimalnya integrasi dan keselarasan perencanaan lintas level pemerintahan Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah Masih Terbatasnya pelaksanaan dan pemanfaatan riset	Tata Kelola Pemerintahan	Tuntutan global terhadap tata kelola pembangunan yang inklusif dan terintegrasi melalui pendekatan *multi-level governance* dan *policy coherence for sustainable development* (PCSD) Meningkatnya tekanan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;	Ketimpangan arah pembangunan antarwilayah Minimnya harmonisasi kebijakan sektoral di daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah secara konsisten, kolaboratif, dan berbasis bukti dalam rangka mendukung penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah melalui penerapan manajemen risiko

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Adanya kolaborasi awal riset daerah dan dukungan SIDa dari pusat Tersedianya sistem perencanaan dan pelaporan internal PD melalui *e-*SAKIP dan *e-Planning* Tersedianya regulasi dan sistem pendukung sinkronisasi pusat-daerah	dan inovasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan		internasional untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas anggaran publik, dan tata kelola pemerintahan yang transparan (*good governance*) Pergeseran ekonomi global menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan inovasi			Penguatan Kapasitas riset dan inovasi daerah untuk mendukung perencanaan dan pembangunan yang responsif dan berdaya saing

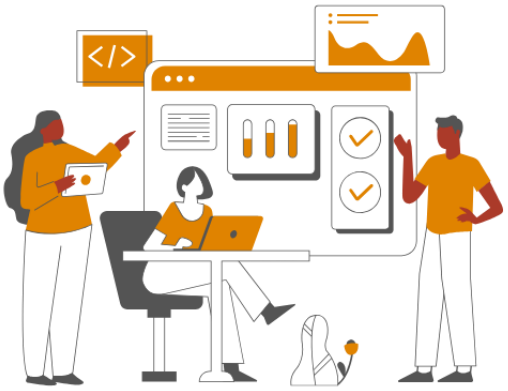
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Telah terbentuk forum perencanaan lintas bidang (musrenbang, rakor teknis, dll)			teknologi sebagai pendorong utama daya saing Standar global mengenai transformasi kelembagaan pemerintah yang adaptif, lincah (*agile government*), dan berbasis hasil (*results-based management*) Kebutuhan penyesuaian kebijakan daerah terhadap komitmen global seperti Agenda			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			2030 (SDGs), perubahan iklim, dan keterpaduan pembangunan lintas negara dan wilayah Dorongan global untuk pendekatan pembangunan yang lintas sektor, terintegrasi, dan berbasis sistem (*systems thinking*) dalam mengatasi tantangan kompleks pembangunan			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

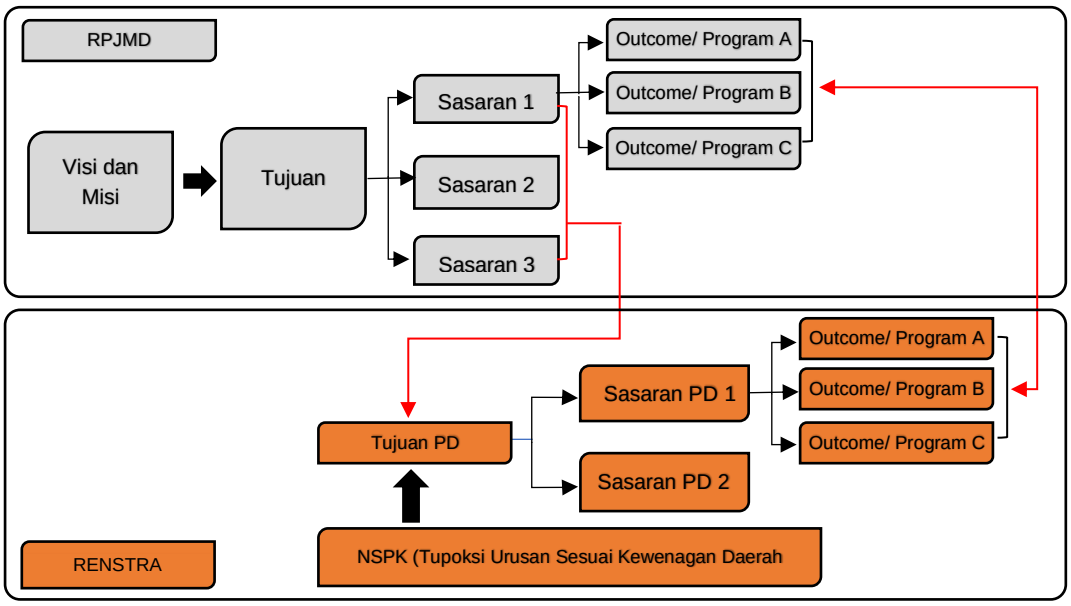
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau



Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dilakukan secara terstruktur dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dan sasaran Bappeda dirancang sebagai turunan langsung dari visi, misi, serta arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, dengan memperhatikan hasil (*outcome*) program pembangunan yang ditargetkan.

Proses perumusannya juga mempertimbangkan ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam mendukung perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah. Dengan pendekatan ini, arah kebijakan kelembagaan dapat disusun secara terpadu, terukur, dan akuntabel, guna memperkuat pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah maupun mendukung target pembangunan nasional secara sinergis.

Gambar 3.1: Keterkaitan Antara RPJMD dan Renstra Dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Riau



Mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis perangkat daerah, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Kontribusi Bappeda diwujudkan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta fasilitasi perencanaan dan pengembangan yang sejalan dengan arah pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel 3.1: Kontribusi Bappeda Provinsi Kepuluan Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASRAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
Visi RPJMD 2025-2029	“Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata”	-
Misi Ke 4	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, terbuka, berbasis teknologi informasi dan berorientasi pelayanan.	-
Tujuan Daerah Ke 1	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah ke 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASRAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Sasaran 1 Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja
		Indeks Manajemen Risiko (MRI)
Sasaran 2 Perangkat Daerah	Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolaboratif dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)

Dengan mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka dirumuskan pula target capaian kinerja yang terukur untuk masing-masing tujuan dan sasaran. Target tersebut disusun sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2025–2029, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Target Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	-	Predikat SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	
	-	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,40	3,40	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (Nilai)	45,93	46,18	46,43	46,68	46,93	47,18	47,43	
		Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
	Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolaboratif dalam	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah									

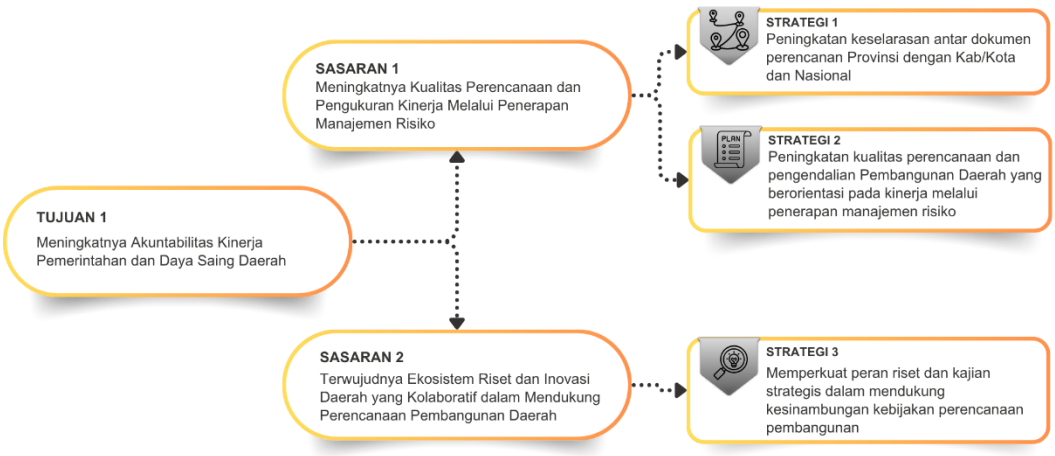
3.2 Strategi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis



Sejalan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang mengedepankan keterpaduan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam penguatan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi pembangunan, fasilitasi kebijakan berbasis riset, serta penyusunan inovasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan kerangka tersebut, berikut dirumuskan Strategi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau untuk periode perencanaan tahun 2025–2029:

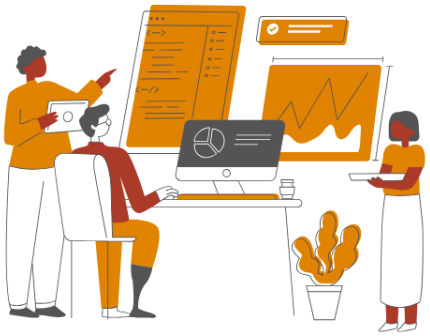
Tabel 3.2: Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2026



Tabel 3.3: Penahapan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

TAHAP	TAHUN	FOKUS TAHAPAN
Tahap 1	2026	Penataan awal sistem perencanaan pembangunan daerah yang dan berbasis kebutuhan riset
Tahap 2	2027	Konsolidasi mekanisme perencanaan berbasis kinerja yang didukung penguatan kolaborasi litbang
Tahap 3	2028	Akselerasi integrasi hasil litbang ke dalam dokumen perencanaan tematik dan sektoral
Tahap 4	2029	Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data, hasil riset, dan sistem inovasi daerah
Tahap 5	2030	Konsolidasi keberlanjutan sistem perencanaan dan penguatan kelembagaan litbang secara terpadu

3.3 Arah Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis



Dalam rangka mewujudkan peran strategisnya sebagai institusi yang mengoordinasikan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun tidak hanya sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai upaya operasionalisasi berbagai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang relevan. Dalam rangka mewujudkan peran strategisnya sebagai institusi yang mengoordinasikan perencanaan, penelitian, dan

pengembangan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun tidak hanya sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai upaya operasionalisasi berbagai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang relevan.

Tabel 3.4: Arah Kebijakan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
Penerapan Norma dan Standar Perencanaan Kolaboratif Pemerintah Daerah	Memantapkan sikronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelakasanaan rencana pembangunan daerah	Mengembangkan mekanisme penyelarasan kebijakan pembangunan antar level Pemerintahan dan antar sektor secara dinamis
Penyesuaian terhadap RPJPN 2025–2045 dan RPJMD Provinsi		Mengarahkan perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung sasaran pembangunan jangka panjang secara konsisten dan berkelanjutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan berorientasi kinerja

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		
Permen PANRB tentang Sistem Manajemen Risiko dalam Tata Kelola Pemerintahan		Implementasi Manajemen Risiko dalam siklus perencanaan serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan integrasi sistem informasi pembangunan		Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis digital dan integratif
Perpres No. 38 Tahun 2023 tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa)		Peningkatan relevansi rekomendasi dan pemanfaatan hasil riset dalam perencanaan pembangunan daerah
Implementasi Permenristek/BRIN tentang penguatan ekosistem inovasi daerah		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung daya saing
Kebijakan Kemendikbudristek dan Bappenas tentang kolaborasi multipihak dalam litbang		Penguatan kolaborasi dan jejaring riset lintas sektor
Permen PANRB dan regulasi Sumber Daya Manusia Litbang		Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelitbangan

BAB IV

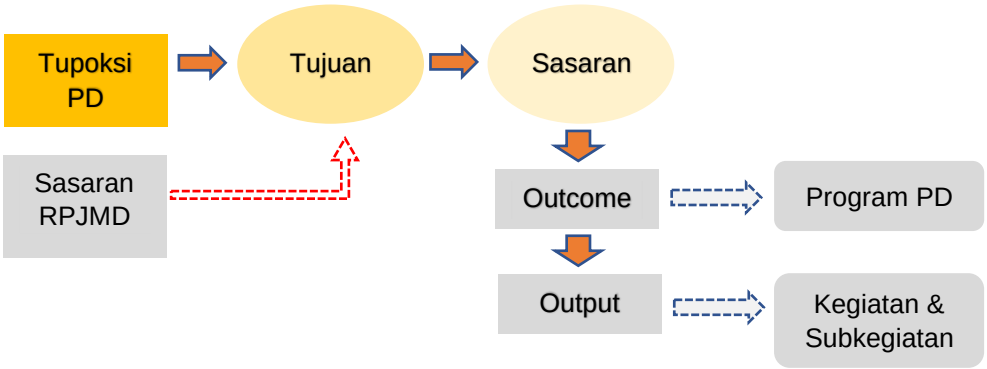
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun melalui proses penurunan (*cascading*) yang sistematis dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Proses ini dilakukan dengan mengaitkan setiap level perencanaan dengan *outcome* dan *output* yang ingin dicapai secara konkret. Penyusunan ini mengacu pada pendekatan perencanaan terpadu yang menyinergikan tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, guna memastikan konsistensi, keselarasan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Semua program dan kegiatan disusun mengikuti nomenklatur resmi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan perubahannya. Selain itu, daftar program dalam dokumen Renstra ini juga mengantisipasi arah kebijakan tahun 2030 sebagai landasan awal kesinambungan rencana, sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2030.

Gambar 4.1: Mekanisme Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.1 Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01 - PERENCANAAN					**33.827.541.514,94**		**35.457.153.370,94**		**35.584.050.217,25**		**35.560.080.662,58**		**39.844.085.181,97**	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**27.446.169.976,13**		**28.672.435.716,14**		**28.902.983.554,25**		**29.518.774.204,58**		**31.550.214.726,97**	
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	A	A	27.446.169.976,13	A	28.672.435.716,14	A	28.902.983.554,25	A	29.518.774.204,58	A	31.550.214.726,97	Bappeda
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,093	90,5	91		91,5		92		92,5		93		Bappeda
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	78,23	78,48	78,98		79,48		79,98		80,48		80,98		Bappeda
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					**3.150.000.000,00**		**3.177.327.000,00**		**2.325.000.000,00**		**1.997.694.000,00**		**3.950.000.000,00**	
Meningkatnya Kualitas	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	60	80	80	3.150.000.000,00	80	3.177.327.000,00	90	2.325.000.000,00	90	1.997.694.000,00	100	3.950.000.000,00	Bappeda

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD (%)	0	71,42	73,47		75,51		77,55		79,59		81,63		Bappeda
	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Menejemen Risiko (%)	0	16,67	14,29		11,9		9,52		7,14		4,76		Bappeda
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**3.231.371.538,81**		**3.607.390.654,80**		**4.356.066.663,00**		**4.043.612.458,00**		**4.343.870.455,00**	
Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	0	76,19	80,95	3.231.371.538,81	85,71	3.607.390.654,80	90,48	4.356.066.663,00	95,24	4.043.612.458,00	100	4.343.870.455,00	Bappeda
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Nilai)	45,94	47,97	46,94		47,44		47,94		48,44		48,94		Bappeda

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	0	72,29	77,11		81,93		86,75		92,77		100		Bappeda
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	0	0	58,82		70,59		82,35		94,12		100		Bappeda
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	100	100	100		100		100		100		100		Bappeda
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	46,83	48,08	47,83		48,33		48,83		49,33		49,83		Bappeda
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah	0	18,64	18,64		20,34		20,34		22,03		22,03		Bappeda

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)													
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	0	20	20		30		30		40		40		Bappeda
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Bappeda
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)	45	46,89	46		46,5		47		47,5		48		Bappeda
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0	52	52		52		63		63		63		Bappeda

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	0	86	100		100		100		100		100		Bappeda
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**1.270.000.000,00**		**1.350.000.000,00**		**1.300.000.000,00**		**1.110.000.000,00**		**1.700.000.000,00**	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					**920.000.000,00**		**1.200.000.000,00**		**1.200.000.000,00**		**1.050.000.000,00**		**1.200.000.000,00**	
Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan (%)	70	75	80	920.000.000,00	85	1.200.000.000,00	90	1.200.000.000,00	95	1.050.000.000,00	100	1.200.000.000,00	Bappeda
	Persentase Inovasi yang dilaporkan (%)	70	75	75		80		80		85		85		Bappeda
	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan (Karya)	20	20	20		20		20		20		20		Bappeda
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					**350.000.000,00**		**150.000.000,00**		**100.000.000,00**		**60.000.000,00**		**500.000.000,00**	

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)	0	0	100	350.000.000	100	105.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Bappeda
TOTAL KESELURUHAN					**35.097.541.514,94**		**36.807.153.370,94**		**36.884.050.217,25**		**36.670.080.662,58**		**41.544.085.181,97**	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Daya Saing Daerah				Predikat SAKIP (Predikat)		Tujuan
					Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)		Tujuan
		Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko			SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (Nilai)		Sasaran
					Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)		Sasaran
			Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Program

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		**Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)** **Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)**	**PROVINSI**	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.1.01.0006 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.1.01.0007 – Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkegiatan
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	5.01.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Subkegiatan
				Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.1.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.01.01.1.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.1.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.1.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.01.01.1.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.1.02.0005 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.1.02.0007 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Subkegiatan
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Subkegiatan
				Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.1.05 – Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.1.05 – Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.1.05 – Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.1.05.0002 – Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Subkegiatan
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.1.05.0009 – Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.1.05.0011 – Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Subkegiatan
				Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Subkegiatan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Subkegiatan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subkegiatan
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subkegiatan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.1.06.0008 – Fasilitasi Kunjungan Tamu	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.1.06.0011 – Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subkegiatan
				Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07.0002 – Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkegiatan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.01.01.1.07.0005 – Pengadaan Mebel	Subkegiatan
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.1.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkegiatan
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.1.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subkegiatan
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.1.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.1.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.1.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.1.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subkegiatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkegiatan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subkegiatan
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah		**Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (%)**	**5.01.02 – PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Program**
					Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD (%)	**5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Program**
					Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Menejemen Risiko (%)	**5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Program**
				Optimalnya Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.1.01 – Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kegiatan
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.1.01 – Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	5.01.02.1.01 – Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5.01.02.1.01 – Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					5.01.02.1.01 – Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.1.01 – Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.1.01.0002 – Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Subkegiatan
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Subkegiatan
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.1.01.0004 – Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Subkegiatan
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5.01.02.1.01.0006 – Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Subkegiatan
				Optimalnya Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.1.02.0001 – Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Subkegiatan
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Optimalnya Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.1.03.0001 – Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.1.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Subkegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program
					Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Nilai)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program
					Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program
					Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program
					Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program
					Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program
					Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program
					Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program
					Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)	5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra= Bidang Infrastruktur dan	**5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Program**
					Kewilayahan (%) Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	**5.01.03 – PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Program**
				Optimalnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.01 – Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.01 – Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01 – Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01 – Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01 – Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01 – Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01 – Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01 – Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.01.0001 – Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01.0002 – Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.1.01.0004 – Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.01.0005 – Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01.0006 – Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.1.01.0008 – Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Optimalnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.02 – Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.02 – Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02 – Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02 – Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.1.02 – Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.02.0001 – Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.1.02.0004 – Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Subkegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.02.0005 – Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.1.02.0008 – Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Subkegiatan
				Optimalnya Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.03 – Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03 – Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03 – Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03 – Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.1.03 – Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.1.03.0001 – Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03.0002 – Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.1.03.0004 – Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.1.03.0008 – Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Subkegiatan
		Sasaran 2: Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolaboratif dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah			**Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)**		**Sasaran**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		**Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan (%)**	**5.05.02 – PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Program**
					Persentase Inovasi yang dilaporkan (%)	**5.05.02 – PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Program**
					Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan (Karya)	**5.05.02 – PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Program**
				Optimalnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.1.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Subkegiatan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.1.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Subkegiatan
					Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Subkegiatan
				Optimalnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.1.02.0001 – Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Subkegiatan
				Optimalnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.1.03.0005 – Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Subkegiatan
				Optimalnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.1.04.0003 – Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Subkegiatan
			Meningkatnya Kebijakan berbasis Bukti dalam Perencanaan Pembangunan		**Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)**	**5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Program**
				Optimalnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan,Pengkajian, dan Penerapan	Kegiatan
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.1.01.0003 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Subkegiatan

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan													
5.01.01 – PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)**	**BB**	**A**	**27.446.169.976,13**	**A**	**28.672.435.716,14**	**A**	**28.902.983.554,25**	**A**	**29.518.774.204,58**	**A**	**31.550.214.726,97**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	**90.093**	**91,00**		**91,50**		**92,00**		**92,50**		**93,00**	
		Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	**78,23**	**78,98**		**79,48**		**79,98**		**80,48**		**80,98**	
5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	1	425.000.000,00	1	375.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	450.000.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	5		5		5		5		5	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	1		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	6		6		6		6		7	
5.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	7	250.000.000,00
5.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00
5.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
5.01.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	1	150.000.000	1	100.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	23.658.812.491,78	1	24.370.155.728,14	1	25.300.185.256,04	1	26.250.424.985,57	1	27.359.450.288,97
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	90	126		128		130		132		134	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
5.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	90	126	22.895.492.491,78	128	3.696.835.728,14	130	24.611.865.256,04	132	25.592.104.985,57	134	26.471.130.288,97
5.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	613.320.000,00	1	613.320.000,00	1	613.320.000,00	1	613.320.000,00	1	613.320.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kauangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kauangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00
5.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00
5.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00
5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	100	555.000.000,00	100	350.000.000,00	100	200.000.000,00	50	150.000.000,00	100	400.000.000,00
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2		2		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	12		10		10		10		10	
5.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	185.000.000,00	1	150.000.000,00	0	0	0	0	1	200.000.000,00
5.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	12	120.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00
5.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	100	250.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	50	50.000.000,00	100	100.000.000,00
5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.319.481.372,35	1	1.567.552.112,00	1	1.621.922.186,21	1	1.284.240.531,01	1	1.716.888.326,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
5.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	30.000.000,00	1	60.000.000,00
5.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00
5.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00
5.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	95.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokuman)	1	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00
5.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00
5.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	689.481.372,35	1	822.552.112,00	1	901.922.186,21	1	699.240.531,01	1	931.888.326,00
5.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00
5.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	135.000.000,00	1	455.000.000,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	330.000.000,00
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		3		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	150	11		10		8		10		10	
5.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	3	105.000.000,00	0	0	0	0	0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	80.000.000,00	1	200.000.000,00
5.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	150	11	135.000.000,00	10	150.000.000,00	8	100.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00
5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	657.876.112,00	1	580.876.112,00	1	580.876.112,00	1	560.876.112,00	1	588.876.112,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
5.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000	1	20.000.000,00
5.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	374.000.000,00	1	242.000.000,00	1	242.000.000,00	1	242.000.000,00	1	250.000.000,00
5.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	218.876.112,00	1	218.876.112,00	1	218.876.112,00	1	218.876.112,00	1	218.876.112,00
5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.076	39	695.000.000,00	40	973.851.764,00	30	650.000.000,00	35	713.232.576,00	35	705.000.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	34		34		37		37		37	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	2		2		2		2		2	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	2	100.000.000,00	2	155.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000	2	155.000.000,00
5.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	34	350.000.000,00	34	550.000.000,00	37	350.000.000,00	37	350.000.000,00	37	350.000.000,00
5.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.076	39	45.000.000,00	40	100.000.000,00	30	150.000.000,00	35	93.232.576,00	35	100.000.000,00
5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	168.851.764,00	1	50.000.000,00	1	170.000.000,00	1	100.000.000,00
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (%)**	**60**	**80**	**3.150.000.000,00**	**80**	**3.177.327.000,00**	**90**	**2.325.000.000,00**	**90**	**1.997.694.000,00**	**100**	**3.950.000.000,00**
		Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD (%)	**0**	**73,47**		**75,51**		**77,55**		**79,59**		**81,63**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
		Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Menejemen Risiko (%)	**0**	**14,29**		**11,9**		**9,52**		**7,14**		**4,76**	
5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalnya Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	15	0	1.350.000.000,00	1	2.125.000.000,00	0	1.350.000.000,00	0	1.070.000.000,00	1	2.600.000.000,00
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1		2		1		1		2	
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		2	
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	2	1		2		1		1		2	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5	2		3		2		2		3	
5.01.02.1.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	15	0	0	1	150.000.000,00	0	0	0	0	1	300.000.000,00
5.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1	150.000.000,00	2	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	110.000.000,00	2	250.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.02.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	150.000.000,00	2	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	110.000.000,00	2	250.000.000,00
5.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	2	1	550.000.000,00	2	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	350.000.000,00	2	500.000.000,00
5.01.02.1.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5	2	500.000.000,00	3	1.200.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	3	1.300.000.000,00
5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalnya Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	200	800.000.000,00	50	227.327.000,00	25	175.000.000,00	25	127.694.000,00	30	200.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
5.01.02.1.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	77.327.000,00	1	75.000.000,00	1	52.694.000,00	1	100.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.02.1.02.0004 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	200	700.000.000,00	50	150.000.000,00	25	100.000.000,00	25	75.000.000,00	30	100.000.000,00
5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalnya Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5	10	1.000.000.000,00	10	800.000.000,00	9	800.000.000,00	10	800.000.000,00	10	1.150.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	0	2		2		2		2		2	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	28	14		14		14		14		28	
5.01.02.1.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5	10	600.000.000,00	10	450.000.000,00	9	450.000.000,00	10	450.000.000,00	10	500.000.000,00
5.01.02.1.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.02.1.03.0004 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	28	14	300.000.000,00	14	250.000.000,00	14	250.000.000,00	14	250.000.000,00	28	450.000.000,00
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)**	**0**	**80,95**	**3.231.371.538,81**	**85,71**	**3.607.390.654,80**	**90,48**	**4.356.066.663,00**	**95,24**	**4.043.612.458,00**	**100**	**4.343.870.455,00**
		Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Nilai)	**45,94**	**46,94**		**47,44**		**47,94**		**48,44**		**48,94**	
		Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	**0**	**77,11**		**81,93**		**86,75**		**92,77**		**100**	
		Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	**0**	**58,82**		**70,59**		**82,35**		**94,12**		**100**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
		Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	100	100		100		100		100		100	
		Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	46,83	47,83		48,33		48,83		49,33		49,83	
		Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	0	18,64		20,34		20,34		22,03		22,03	
		Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	0	20		30		30		40		40	
		Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0	100		100		100		100		100	
		Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)	45	46		46,5		47		47,5		48	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
		Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	**0**	**52**		**52**		**63**		**63**		**63**	
		Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	**0**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Optimalnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1	1.055.058.850,00	1	1.227.450.409,80	1	1.411.323.780,00	1	1.418.038.000,00	2	1.543.745.856,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		2	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	0		0		0		1		2	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0		0		0		1		2	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		2	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	4		4		5		7		5	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0		0		0		0		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.03.1.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	79.011.770,00	1	162.745.041,00	1	172.901.156,00	1	173.075.300,00	2	187.441.617,00
5.01.03.1.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	117.809.150,00	2	121.122.237,00
5.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	90.814.124,00	1	135.294.049,00	1	194.773.876,00	1	195.181.760,00	2	198.494.847,00
5.01.03.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99.015.777,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.03.1.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1	79.011.770,00	1	162.745.041,00	1	172.901.156,00	1	173.075.300,00	2	170.861.772,00
5.01.03.1.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	0	0	0	0	0	0	1	117.809.150,00	2	121.122.237,00
5.01.03.1.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	206.221.186,00	1	202.941.073,80	1	260.392.036,00	1	198.958.140,00	1	259.287.612,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.03.1.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	4	600.000.000,00	4	563.725.205,00	5	610.355.556,00	7	442.129.200,00	5	386.399.757,00
5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Optimalnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	1.159.015.749,81	1	1.161.304.245,00	1	1.375.138.190,00	1	1.249.541.458,00	1	1.373.383.743,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
5.01.03.1.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1	359.015.749,81	1	261.304.245,00	1	320.987.966,00	1	299.369.458,00	1	354.172.315,00
5.01.03.1.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	1	100.000.000,00	1	225.000.000,00	1	263.537.556,00	1	212.543.000,00	1	254.802.857,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.03.1.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	500.000.000,00	1	225.000.000,00	1	263.537.556,00	1	262.543.000,00	1	254.802.857,00
5.01.03.1.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	225.000.000,00	1	263.537.556,00	1	262.543.000,00	1	254.802.857,00
5.01.03.1.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0	1	100.000.000,00	1	225.000.000,00	1	263.537.556,00	1	212.543.000,00	1	254.802.857,00
5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Optimalnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	1.017.296.939,00	1	1.218.636.000,00	1	1.569.604.693,00	1	1.376.033.000,00	1	1.426.740.856,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
5.01.03.1.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	225.000.000,00	1	275.000.000,00	1	402.075.112,00	1	337.543.000,00	1	359.605.714,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.01.03.1.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	302.075.112,00	1	300.086.000,00	1	259.605.714,00
5.01.03.1.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	175.000.000,00	1	268.636.000,00	1	363.379.357,00	1	300.861.000,00	1	322.923.714,00
5.01.03.1.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	227.296.939,00	1	275.000.000,00	1	402.075.112,00	1	337.543.000,00	1	359.605.714,00
5.01.03.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	1	215.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan BIdang Penelitian dan Pengembangan													
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah**	**Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan (%)**	**70**	**80**	**920.000.000,00**	**85**	**1.200.000.000,00**	**90**	**1.200.000.000,00**	**95**	**1.050.000.000,00**	**100**	**1.200.000.000,00**
		Persentase Inovasi yang dilaporkan (%)	**70**	**75**		**80**		**80**		**85**		**85**	
		umlah Diseminasi Hasil Kelitbangan (Karya)	**20**	**20**		**20**		**20**		**20**		**20**	
5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Optimalnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	0	1	470.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	660.000.000,00	1	750.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.05.02.1.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	1	135.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
5.05.02.1.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	1	135.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
5.05.02.1.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	250.000.000,00
5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Optimalnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	70.000.000,00	1	150.000.000,00
5.05.02.1.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	70.000.000,00	1	150.000.000,00
5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Optimalnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	70.000.000,00	0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU
5.05.02.1.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	70.000.000,00	0	0
5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Optimalnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00
5.05.02.1.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	**Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti dalam Perencanaan Pembangunan**	**Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)**	**100**	**100**	**350.000.000,00**	**100**	**150.000.000,00**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**500.000.000,00**
5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Optimalnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1	350.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	60.000.000,00	1	500.000.000,00
5.05.03.1.01.0003 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1	350.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	60.000.000,00	1	500.000.000,00

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
I	Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan			
a.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah		
		Optimalnya Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
		Optimalnya Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan



Pengukuran kinerja atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda)

Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui pemanfaatan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU digunakan sebagai indikator strategis yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, IKK berfungsi untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Bappeda, khususnya dalam mendukung perencanaan berbasis data, inovasi kebijakan, serta sinkronisasi program lintas sektor. Penerapan kedua indikator ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja kelembagaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan strategis, serta menjadi dasar dalam proses evaluasi kinerja tahunan maupun evaluasi periode Renstra secara objektif dan terukur.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	5.01.5.05.0.00.24.0000 – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									
1.	SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	Nilai	45,93	46,18	46,43	46,68	46,93	47,18	47,43	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3.	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5.01 - PERENCANAAN									
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Positif	Predikat	BB	A	A	A	A	A	A
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Positif	Indeks	90,093	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00
3.	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Positif	%	0	76,19	80,95	85,71	90,48	95,24	100
4.	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	Positif	%	60	80	80	80	90	90	100
5.	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Positif	Indeks	78,23	78,48	78,98	79,48	79,98	80,48	80,98
6.	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Positif	Nilai	45,94	47,97	46,94	47,44	47,94	48,44	48,94

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD	Positif	%	0	71,42	73,47	75,51	77,55	79,59	81,63
8.	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Positif	%	0	72,29	77,11	81,93	86,75	92,77	100
9.	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Menejemen Risiko	Positif	%	0	16,67	14,29	11,9	9,52	7,14	4,76
10.	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	Positif	%	0	0	58,82	70,59	82,35	94,12	100
11.	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100
12.	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan	Positif	Nilai	46,83	48,08	47,83	48,33	48,83	49,33	49,83

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam									
13.	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Positif	%	0	18,64	18,64	20,34	20,34	22,03	22,03
14.	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	Positif	%	0	20	20	30	30	40	40
15.	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Positif	%	0	100	100	100	100	100	100
16.	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Positif	Nilai	45	46,89	46	46,5	47	47,5	48
17.	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah	Positif	%	0	52	52	52	63	63	63

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									
18.	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	Positif	%	0	86	100	100	100	100	100
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
19.	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	Positif	%	70	75	80	85	90	95	100
20.	Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan	Positif	%	0	0	100	100	100	100	100
21.	Persentase Inovasi yang dilaporkan	Positif	%	70	75	75	80	80	85	85
22.	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan	Komulatif	Karya	20	20	20	20	20	20	20

BAB V

PENUTUP



5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan strategis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Dokumen ini disusun guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki peran sentral dalam memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor, penyediaan data dan informasi perencanaan yang andal, serta pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah dan inovatif. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, integrasi, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta selaras dengan regulasi dan pedoman teknis perencanaan nasional.

Melalui dokumen Renstra ini, Bappeda diarahkan untuk memperkuat peranannya dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, mendorong pengembangan riset yang aplikatif dan responsif terhadap isu strategis daerah, serta membangun sistem inovasi daerah yang kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan. Upaya tersebut diwujudkan antara lain melalui penguatan kapasitas perencanaan berbasis data, pelaksanaan kajian tematik dan sektoral yang mendukung pengambilan keputusan, serta peningkatan integrasi antarperangkat daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan. Renstra ini juga menjadi acuan dalam memperkuat kolaborasi multipihak dan penguatan kelembagaan Bappeda dalam menjalankan peran strategisnya.

Tujuan, sasaran, strategi, serta program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen ini disusun secara sistematis berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang

dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dan dikembangkan sesuai dengan mandat dan fungsi strategis Bappeda. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan menjadi instrumen perencanaan yang efektif dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif, berbasis bukti, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan inovasi. Renstra ini berperan sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan Bappeda, baik dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis bukti maupun dalam penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan adaptif.

Adapun prinsip-prinsip utama yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau mencakup:

1) Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran; Seluruh program dan kegiatan dirancang agar konsisten dan sinergis dengan dokumen Rencana Kerja (Renja), RKPD, dan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
2) Pendekatan Berbasis Hasil (*Result-Based Management*); Setiap intervensi program difokuskan pada hasil nyata dan terukur, yang dicerminkan melalui indikator output dan outcome di bidang perencanaan, litbang, dan inovasi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk

meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Bappeda serta memperkuat akuntabilitas kinerjanya.

3) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja; Capaian pelaksanaan Renstra akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala, dan hasilnya menjadi bagian integral dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda. Proses ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mendorong perbaikan berkelanjutan.
4) Penyesuaian terhadap Dinamika Strategis; Renstra Bappeda disusun dengan fleksibilitas adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, perubahan lingkungan strategis, serta hasil evaluasi yang signifikan. Penyesuaian dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan menjaga kesinambungan arah pembangunan.
5) Koordinasi dan Sinergi Multipihak; Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat bergantung pada kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif ini diarahkan untuk memperkuat kapabilitas Bappeda dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif dan inklusif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat berlangsung secara profesional, adaptif, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya sistem perencanaan dan pengembangan daerah yang berbasis data, inovatif, dan berkelanjutan.



5.3 Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko

Pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 memerlukan dukungan sistem pengendalian internal

yang efektif, evaluasi kinerja yang berkesinambungan, serta penerapan manajemen risiko yang responsif. Ketiga komponen ini merupakan instrumen penting untuk menjamin bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah dapat dilaksanakan secara terarah, efisien, dan selaras dengan tujuan strategis pembangunan provinsi.

Adapun pelaksanaan aspek pengendalian, evaluasi, dan mitigasi risiko dilakukan melalui pendekatan berikut:

1) Pengendalian Internal

   Bappeda Kepri melakukan pengendalian dengan memantau pelaksanaan kegiatan perencanaan dan litbang secara berkala, melalui pelaporan kinerja rutin, supervisi teknis, serta pembinaan yang berjenjang terhadap unit-unit pelaksana. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, serta mencegah potensi penyimpangan atau inefisiensi.

2) Evaluasi Kinerja

   Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menilai pencapaian output dan outcome dari program strategis Bappeda. Proses ini terintegrasi dalam mekanisme perencanaan tahunan (Renja), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan berbasis hasil serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

3) Manajemen Risiko

   Menghadapi tantangan strategis seperti perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya, hingga dinamika sosial ekonomi, Bappeda menerapkan manajemen risiko sejak tahap perumusan kebijakan dan program. Risiko yang teridentifikasi dianalisis dan ditangani melalui strategi mitigasi yang tepat, guna memastikan kelangsungan dan efektivitas pelaksanaan fungsi perencanaan dan litbang.

4) Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

Temuan dari proses pengendalian dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan tata kelola kelembagaan dan penyempurnaan program secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa Bappeda senantiasa adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional, dinamika regional, serta aspirasi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan inovasi daerah secara berkesinambungan.

Dengan penerapan sistem pengendalian internal, evaluasi kinerja, dan manajemen risiko yang terintegrasi dan adaptif, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis data, *evidence-based policy*, serta berkelanjutan.